



KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKOLAH DASAR

Slamet Widodo¹, Adhy Putri Rilianti², Wulida Arina Najwa³, M. Misbachul Huda⁴,
Anang Fathoni⁵

^{1,2,3,4}STKIP Al Hikmah

⁵Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Email: slametwidododikdas@gmail.com, adhyputrir@gmail.com, najwaarina@gmail.com,
mizzzbach@gmail.com, ananglight@gmail.com

Abstract

The purpose of writing this article is to describe the independent curriculum policy and its implementation on campuses and elementary schools. The type of research used in this study is literature review research. The research approach used is in the form of systematic characteritic samples using sources of written works such as books, articles, policy documents, and other types of written works. The results of the analysis found that the independent learning policy document was 30 articles. This research procedure consists of 4 stages, including: (1) making designs, (2) conducting studies, (3) analyzing, and (4) compiling and writing results. The results of the review are divided into 3, namely: (1) independent curriculum, (2) implementation of independent curriculum on educational campuses, and (3) implementation of independent curriculum in elementary schools. In the independent curriculum, there are several characteristics, including: changes in class hours and teaching teachers, strengthening the profile of Pancasila students, local content, teaching modules, project-based learning, learning outcomes formed phases hierarchically, independent teaching platforms, and curriculum structure. For educational campuses, with the independent curriculum policy, the campus needs to complete course materials with the needs of an independent curriculum, the campus needs to provide learning rights to students to study outside the study program, the campus needs to adjust changes in the definition of credits, and the campus needs to conduct a scheduled study tracer to measure the quality of performance. Each elementary school is free to determine the curriculum to be applied. Some of the tasks if elementary schools implement an independent curriculum are the application of Natural and Social Sciences, the integration of skills lessons in art lessons, and the application of school assessments.

Keywords: independent learning, independent curriculum, education, elementary school

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan kurikulum merdeka dan implementasinya di kampus dan sekolah dasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian literature review. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa karakteritik sample secara sistematis dengan menggunakan sumber karya tulis seperti buku, artikel, dokumen kebijakan, dan jenis karya tulis lainnya. Hasil analisis ditemukan dokumen kebijakan merdeka belajar sebanyak 30 artikel. Prosedur penelitian ini terdiri dari 4 tahap, antara lain yaitu: (1) membuat desain, (2) melakukan kajian, (3) menganalisis, dan (4) menyusun dan menulis hasil. Hasil review dibagi menjadi 3, yaitu: (1) kurikulum merdeka, (2) implementasi kurikulum merdeka di kampus pendidikan, dan (3) implementasi kurikulum merdeka di SD. Dalam kurikulum merdeka

terdapat beberapa karakteristik antara lain yaitu: perubahan jam pelajaran dan mengajar guru, penguatan profil pelajar Pancasila, muatan lokal, modul ajar, pembelajaran berbasis proyek, capaian pembelajaran dibentuk fase secara hierarki, platform merdeka mengajar, dan struktur kurikulum. Bagi kampus pendidikan, dengan adanya kebijakan kurikulum merdeka maka kampus perlu melengkapi materi mata kuliah dengan kebutuhan kurikulum merdeka, kampus perlu memberikan hak belajar ke mahasiswa untuk belajar di luar prodi, kampus perlu menyesuaikan perubahan definisi SKS, dan kampus perlu melakukan tracer studi yang terjadwal untuk mengukur kualitas kinerja. Setiap SD bebas menentukan kurikulum yang akan diterapkan. Beberapa kekhawatiran apabila SD menerapkan kurikulum merdeka yaitu penerapan IPAS, integrasi pelajaran keterampilan di pelajaran seni, dan penerapan asesmen sekolah.

Kata Kunci : merdeka belajar, kurikulum merdeka, pendidikan, sekolah dasar

PENDAHULUAN

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) membuat kebijakan merdeka belajar. Dasar kebijakan tersebut merupakan buah dari arahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Awal peluncuran kebijakan merdeka belajar tepatnya pada hari Rabu, 11 Desember 2019 yang terdiri dari empat program utama, antara lain yaitu: 1) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), 2) Ujian Nasional, 3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 4) Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi (Kemdikbudristek, 2019). Kebijakan merdeka belajar membantu dalam menanggulangi permasalahan pembelajaran yang terjadi karena munculnya pandemic Covid-19, melalui kebijakan yang memberikan fleksibilitas dan independensi dalam pembelajaran (Rawati et al., 2022).

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi kebijakan merdeka belajar, antara lain: 1) guru kurang merdeka dalam melakukan penilaian, 2) anggaran USBN belum mampu meningkatkan kapasitas guru, sekolah dan pembelajaran, 3) hasil kompetensi literasi dan numerasi yang diselenggarakan oleh Programme for International Student Assessment (PISA) dan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan peringkat yang buncit, dan 4) guru lebih banyak tugas administratif dari pada tugas pengembangan pengajaran dan asesmen (Kemdikbudristek, 2019).

Setelah diterbitkan kebijakan pokok tersebut, sampai saat ini per 11 Mei 2022 sudah ada 19 kebijakan pendidikan, antara lain yaitu: 1) Merdeka belajar 1 tentang Asesmen Nasional, USBN, RPP, dan PPDB, 2) Merdeka belajar 2 tentang Kampus Merdeka, 3) Merdeka Belajar 3 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Operasional Sekolah (BOS), 4) Merdeka Belajar 4 tentang Program Organisasi Penggerak, 5) Merdeka Belajar 5 tentang Guru Penggerak, 6) Merdeka Belajar 6 tentang Transformasi Dana Pemerintah untuk Perguruan Tinggi, 7) Merdeka Belajar 7 tentang Program Sekolah Penggerak, 8) Merdeka Belajar 8 tentang SMK pusat Keunggulan, 9) Merdeka Belajar 9 tentang KIP Kuliah Merdeka, 10) Merdeka Belajar 10 tentang Perluasan Program Beasiswa LPDP, 11) Merdeka Belajar 11 tentang Kampus Merdeka Vokasi, 12) Merdeka Belajar 12 tentang Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPlah, 13) Merdeka Belajar 13 tentang Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana, 14) Merdeka Belajar 14 tentang Kampus Merdeka dari Kekerasan

Seksual, 15) Merdeka Belajar 15 tentang Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, 16) Merdeka Belajar 16 tentang Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, 17) Merdeka Belajar 17 tentang Revitalisasi Bahasa Daerah, 18) Merdeka Belajar 18 tentang Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesia, dan 19) Merdeka Belajar 19 tentang Rapor Pendidikan Indonesia (Kemendikbudristek, 2021b).

Dari seluruh kebijakan tersebut yang perlu diperhatikan secara detail dan impelemntasinya membutuhkan inovasi adalah kebijakan kurikulum merdeka karena dalam penerapan kurikulum, siswa, orang tua, guru, dan sekolah membutuhkan inovasi teknis di lapangan. Selain itu, belum banyak artikel yang membahas impelemntasi kurikulum merdeka karena dianggap masih baru. Di sisi lain, pengeimpelentasian kurikulum merdeka tidaklah wajib, namun pilihan sehingga institusi pendidikan bebas menerapkan kurikulum 2013, kurikulum darurat, atau kurikulum merdeka. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengimplementasian kurikulum merdeka. Melalui artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci tentang pengimplementasian dan inovasi kurikulum merdeka bagi guru, siswa dan institusi pendidikan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian literature review. Literature review merupakan penelitian sintesis untuk menemukan bukti yang mencangkup area yang dibutuhkan untuk menghasilkan kerangka teoritis dan membangun model konsep (Snyder, 2019). Pendekatan penelitian yang digunakan berupa karakteristik sample secara sistematis dengan menggunakan sumber karya tulis seperti buku, artikel, dokumen kebijakan, dan jenis karya tulis lainnya. Hasil analisis ditemukan dokumen kebijakan merdeka belajar sebanyak 30 artikel. Prosedur penelitian ini terdiri dari 4 tahap, antara lain yaitu: 1) membuat desain, 2) melakukan kajian, 3) menganalisis, dan 4) menyusun dan menulis hasil.

Tahap desain dilakukan beberapa hal yaitu: 1) pemlihan tema dan sumber yang dibutuhkan, 2) membuat kontribusi, 3) menentukan jenis objek review, 4) menyusun tujuan penelitian, 5) menyusun metode review, dan 6) menyusun strategi pencarian kata kunci. Tahap melakukan kajian terdiri dari beberapa hal yaitu: 1) melaksanakan rencana untuk memilih artikel, 2) mencari artikel, dan 3) memilih artikel yang berkualitas. Tahap analisis akan dilakukan beberapa hal yaitu: 1) memilih informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, 2) menyaring informasi yang berkualitas, dan 3) memetakan jenis dan hasil analisis yang akan ditulis. Sedangkan tahap menyusun dan menulis hasil akan dilakukan beberapa hal yaitu: 1) menentukan standar penulisan, 2) menyusun berdasarkan level informasi yang dibutuhkan, 3) proses penulisan secara jelas dalam bentuk penjelasan deskripsi.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. KURIKULUM MERDEKA

1) Urgensi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka lahir berdasarkan kebutuhan pendidikan Indonesia dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) dan kesenjangan yang

curam antarwilayah di Indonesia. Pandemi Covid-19 semakin menjadi pemicu perubahan kurikulum di Indonesia. Dari pemerintah pusat sampai guru di sekolah terus menginovasi pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca dan numerik peserta didik di Indonesia masih rendah. Rata-rata skor Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018 menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca yakni 371 begitu pula pada kategori matematika, yaitu 379, dan kategori sains yaitu 396, dengan peringkat berturut-turut sesuai kategori yaitu 73, 72, dan 70 dari 79 negara (OECD, 2019).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melakukan perubahan yang cukup signifikan. Sekolah diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolahnya. Guru diberikan kemerdekaan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan peserta didik. Hal ini dilakukan agar pembelajaran lebih sesuai dan memaksimalkan potensi peserta didik. Kemendikbudristek juga menginginkan agar sekolah dapat menjadi tempat belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan (Kemendikbudristek, 2021b). Peserta didik dengan berbagai karakteristik akan merasa nyaman berada di sekolah karena dihargai oleh guru dan seluruh warga sekolah. Potensinya dikembangkan dengan berbagai kegiatan yang dirancang oleh sekolah sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud.

2) Perubahan Jam Pelajaran

Alokasi waktu pada Kurikulum Merdeka di SD masih sama dengan Kurikulum 2013, hanya saja pembelajarannya tidak hanya untuk intrakurikuler tetapi juga proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Perbedaannya juga terletak pada pengorganisasian penetapan jam pelajarannya (JP). Pada Kurikulum Merdeka, Kemdikbudristek hanya menentukan jumlah JP per tahun, sedangkan pengorganisasian JP per minggunya diserahkan ke sekolah. Penekanan Kurikulum Merdeka adalah pada tercapainya Capaian Pembelajaran (CP) pada tiap fasenya.

3) Profil Pelajar Pancasila

Profil pelajar Pancasila merupakan salah satu ciri khas dari Kurikulum Merdeka. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan (Kemendikbudristek, 2021b). Dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 009/H/KR/2022 tentang Dimensi, Elemen, dan Sub elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka, disebutkan bahwa profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik.

Profil pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebhinnekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif. Keenam dimensi ini perlu

dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

4) Muatan Lokal

Muatan lokal pada Kurikulum Merdeka dikelola secara fleksibel oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya. Muatan tambahan juga dapat ditambahkan oleh satuan pendidik melalui 3 pilihan, antara lain 1) mengintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, 2) mengintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan/atau, 3) mengembangkan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

5) Pembelajaran Berbasis Proyek

Pengukuran keberhasilan profil pelajar Pancasila dilihat dari penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila (Kemendikbudristek, 2021a). Penilaian ini didasarkan pada proyek yang dipilih dalam tema proyek. Profil pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebhinnekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya, pada alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah 20-30% dari jam pelajaran di SD. Pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek (Project based learning) di luar pembelajaran intrakurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal, struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar (Kemendikbudristek, 2021b). Peserta didik melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Tersedia 5 tema proyek untuk SD, yaitu 1) Gaya Hidup Berkelanjutan, 2) Kearifan Lokal, 3) Bhinneka Tunggal Ika, 4) Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI, dan 5) Kewirausahaan. Dari 5 tema tersebut, SD wajib memilih dua tema untuk dilaksanakan per tahun. Tema proyek ditetapkan oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari Program Tahunan (Prota). Prota disusun oleh guru dan juga bisa melibatkan peserta didik jika sudah terbiasa dengan pelaksanaan proyek.

Hasil proyek didokumentasikan dalam jurnal guru dan portofolio peserta didik. Jurnal guru yang berisi rekam jejak proses pembelajaran peserta didik dan refleksi kritis guru terhadap proses pelaksanaan proyek. Portofolio peserta didik berisi kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan (reflektif-kritis) dalam kurun waktu tertentu (Kemendikbudristek, 2021b). Proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga dilaporkan melalui rapor proyek yang dapat diberikan di akhir tahun. Rapor proyek menyajikan perkembangan anak dengan prinsip, 1) menunjukkan keterpaduan, 2) tidak menjadi beban administrasi yang berat bagi guru, dan 3)

menyajikan kompetensi utuh pencapaian peserta didik, baik dari pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya.

6) **Capaian Pembelajaran (CP)**

Capaian Pembelajaran merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang disusun sebagai satu kesatuan proses berkelanjutan yang membangun kompetensi secara utuh dari suatu mata pelajaran (Kemendikbudristek, 2021b, p. 39). Tiga ranah kompetensi seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebelumnya muncul dalam kurikulum 2013 yang diwujudkan secara berimbang (Nurholis et al., 2022). Capaian pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara menyeluruh dan mendalam dalam bentuk narasi (Sufyadi et al., 2021, p. 17). Adapun, capaian pembelajaran bukan menjadi pengganti dari Standar Kompetensi Kelulusan (SKL), namun memiliki kedudukan setara dengan KI dan KD dalam Kurikulum 2013 (Kemendikbudristek, 2021b).

Kemudian, berdasarkan capaian pembelajaran, selanjutnya pendidik dapat menyusun alur tujuan pembelajaran secara fleksibel, dengan melihat kriteria alur tujuan pembelajaran (Sufyadi et al., 2021, p. 18) yaitu 1) menggambarkan urutan pengembangan yang harus dikuasai peserta didik; 2) alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase; 3) alur tujuan pada keseluruhan fase menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Penyusunan CP per fase merupakan upaya untuk memberikan kesempatan 1) bagi peserta didik belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka; dan 2) bagi guru dan satuan pendidikan untuk mendapatkan fleksibilitas dan keselarasan pada kondisi dan karakteristik peserta didik dalam belajar (Kemendikbudristek, 2021b, p. 40).

Selanjutnya alur untuk mencapai akhir fase disesuaikan dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik tidak selalu berada dalam fase yang sama untuk setiap mata pelajaran (Kemendikbudristek, 2021b, p. 41). Walaupun demikian, pada setiap akhir fase terdapat kompetensi sama yang harus dicapai oleh peserta didik.

7) **Perangkat Ajar**

Berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022) menjelaskan bahwa perangkat ajar adalah berbagai bahan ajar yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai profil pelajar Pancasila dan Capaian Pembelajaran. Perangkat ajar dapat membantu guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan prinsip mengedepankan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik (Kemendikbudristek, 2021b, p. 42). Hal ini tentu memberikan fleksibilitas tersendiri bagi guru dalam mengeksplorasi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi iklim belajar di masing-masing sekolah. Perangkat ajar yang dimaksudkan meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila, contoh-contoh kurikulum operasional satuan pendidikan, video pembelajaran, serta

bentuk lainnya (Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022, p. 68).

Kemudian, akses dari perangkat ajar ini dapat melalui 1) media cetak, dalam bentuk teks yang disediakan Kemendikbudristek secara daring dan cetak melalui prosedur distribusi mengikuti peraturan yang berlaku; dan 2) daring, dalam bentuk modul ajar yang dapat diakses dan digunakan melalui platform Merdeka Mengajar (Kemendikbudristek, 2021b, p. 42).

Selanjutnya, modul ajar merupakan salah satu bagian dari perangkat ajar yang merupakan dokumen yang memiliki isi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran (Kemendikbudristek, 2021b, p. 42; Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022, p. 69).

Pada dasarnya modul ajar sudah dianggap sebagai RPP apabila guru menggunakan ataupun mengembangkan modul ajar yang disediakan oleh pemerintah (Kemendikbudristek, 2021b, p. 43). Oleh karena itu, pendidik yang menggunakan modul ajar yang disediakan Pemerintah tidak lagi perlu menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP (Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022, p. 69).

8) Pembelajaran Berdasarkan Tahapan Capaian Siswa

Pembelajaran berdasarkan tahap capaian siswa tentu memberikan fleksibilitas dan kemerdekaan bagi peserta didik untuk menyesuaikan pembelajaran dan penilaian dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsen pengajaran yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan awal dan tingkat capaian peserta didik. Sehingga tahapan yang terbentuk berdasarkan informasi dari Kemendikbudristek (2021b, pp. 45–46) yaitu 1) guru memberikan asesmen terhadap level pembelajaran dari peserta didik; 2) peserta didik dikelompokkan berdasarkan pada kemampuan yang serupa dan tingkat capaiannya; 3) guru memberikan intervensi pengajaran dan ragam aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan level pembelajaran dari peserta didik; 4) guru mengajarkan kemampuan dasar yang penting dimiliki peserta didik dengan terus memantau kemajuannya.

Asesmen yang dimaksudkan, dilakukan di awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik (Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022, p. 61). Hasil dari asesmen tersebut digunakan untuk membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Kemudian, apabila didapati peserta didik di kelas tertentu belum mencapai level kemampuan dasar yang diperlukan pada level kelas tersebut, maka guru perlu memberikan intervensi yang bersesuaian dengan kemampuan peserta didik yang dimiliki saat itu. Selanjutnya menuntaskan kebutuhan belajarnya, dan tidak memberikan paksaan terhadap level yang belum mampu dicapai pada kelas tersebut.

9) Platform Merdeka Mengajar

Platform merdeka mengajar merupakan platform edukasi untuk mendukung guru dalam meningkatkan kompetensi dan menyajikan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka (Kemendikbudristek, 2021b, p. 48). Platform merdeka mengajar dapat diakses melalui aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh di Google Playstore maupun melalui laman situs guru.kemendikbud.go.id (Kemendikbudristek, 2021a). Platform merdeka mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan Kurikulum Merdeka (Kemendikbud RI, 2022). Platform ini dikembangkan oleh Kemendikbudristek bekerja sama dengan Gov Tech Edu – PT Telkom Indonesia. Tujuan peluncuran platform ini adalah untuk membantu para guru mengajar sesuai dengan kemampuan peserta didik; menyediakan latihan untuk meningkatkan kompetensi; serta berkarya dan menginspirasi rekan sejawat (Siaran Pers Kemendikbudristek, 2022).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi utama dalam platform merdeka mengajar, yaitu 1) Mengajar, yang berarti bahwa dalam platform ini disediakan lebih dari 2000 referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka. Pengemasan produk dari fungsi mengajar dispesifikasikan menjadi dua kategori yaitu a) Perangkat ajar; dan b) Asesmen murid (Kemendikbudristek, 2021a, p. 5); 2) Belajar, yang berarti bahwa platform ini memberikan kesempatan bagi para guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya di mana saja, dan kapan saja menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Pengemasan produk dari fungsi belajar dispesifikasikan menjadi dua kategori yaitu a) Video Inspirasi, dan b) Pelatihan Mandiri (Kemendikbudristek, 2021a, p. 5); dan 3) Berkarya, yang berarti bahwa platform ini mendorong guru untuk terus berkarya atau ikut berpartisipasi dalam menciptakan konten, sharing karya dalam komunitas pendidikan, berbagi inspirasi, dan berkolaborasi dengan guru lain.

10) Struktur Kurikulum Merdeka

Berdasarkan Kepmendikbudristek No. 56 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, struktur kurikulum SD/MI dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1) Fase A untuk kelas I dan kelas II, 2) Fase B untuk kelas III dan kelas IV, dan 3) Fase C untuk kelas V dan kelas VI. Pembagian tersebut didasarkan pada karakteristik peserta didik.

Struktur Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu 1) pembelajaran intrakurikuler dan 2) proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran intrakurikuler mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan jenjang masing-masing. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler di SD disusun sesuai CP masing-masing mata pelajaran. Beban belajar setiap muatan atau mata pelajaran ditentukan oleh pemerintah dalam Jam Pelajaran (JP) per tahun, sedangkan setiap pekannya diatur sendiri oleh satuan pendidikan.

Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kegiatan ini selalu ada dari jenjang PAUD sampai SMA/ sederajat, hanya saja perbedaannya adalah pada porsi alokasi beban belajar per

tahunnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 20% beban belajar per tahun.

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan pada hampir semua mata pelajaran kecuali Bahasa Inggris dan Muatan Lokal. Alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada mata pelajaran Bahasa Indonesia pada kelas I-V adalah 72 JP per tahun sedangkan kelas VI adalah 32 JP per tahun. Selain mata pelajaran Bahasa Indonesia, proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kelas I-V dialokasikan 36 JP per tahun, sedangkan pada kelas VI adalah 32 JP per tahun. Total JP Kelas I-V yaitu 252 dan Kelas VI yaitu 224.

11) IPAS di Sekolah Dasar

Berdasarkan Kepmendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022) menjelaskan bahwa terdapat integrasi mata pelajaran IPA dan IPS di tingkat SD/MI dengan mengubah penamaan menjadi Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). Penggabungan ini didasari pada usia anak SD/MI yang masuk pada tahap berpikir konkret/sederhana, holistik, dan komprehensif, namun tidak mendetail (Kemendikbudristek, 2021b, p. 20). Integrasi dari IPS di tingkat sekolah dasar memang memungkinkan bersinggungan dengan pembelajaran IPA, karena dengan integrasi dan terhubungnya IPA dan IPS memberikan tambahan pengetahuan yang lebih holistik dalam lingkup ilmu kemasyarakatan dan lingkungan alam (Tarsini & Ningsih, 2021).

Dalam kurikulum merdeka, mata pelajaran IPAS diajarkan di Fase B (kelas III-IV) dan Fase C (kelas V-VI) sebagai katalisator peserta didik untuk sadar terhadap lingkungan alam dan sosialnya. Tujuan mata pelajaran IPAS yaitu 1) mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu sehingga peserta didik terpacu untuk mengkaji fenomena yang ada di sekitar manusia, memahami alam semesta dan kaitannya dengan kehidupan manusia; 2) berperan dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan alam, mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan bijak; 3) mengembangkan keterampilan inkuiri untuk mengidentifikasi, merumuskan hingga menyelesaikan masalah melalui aksi nyata; 4) mengerti siapa dirinya, memahami bagaimana lingkungan sosial dia berada, memaknai bagaimanakah kehidupan manusia dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu; 5) memahami persyaratan yang diperlukan peserta didik untuk menjadi anggota suatu kelompok masyarakat dan bangsa serta memahami arti menjadi anggota masyarakat bangsa dan dunia, sehingga dia dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungan di sekitarnya; dan 6) mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep di dalam IPAS serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka, 2022).

12) Tidak Adanya Mata Pelajaran Keterampilan

Mata pelajaran keterampilan atau prakarya di SD/MI dalam kurikulum merdeka dihilangkan dan diwadahi melalui mata pelajaran Seni dan Budaya (Kemendikbudristek, 2021b, p. 21). Sedangkan di tingkat SMP/MTs, dan SMA/MA menghadirkan kembali mata pelajaran keterampilan atau prakarya yang dikemas dalam mata pelajaran Seni dan Prakarya. Berdasarkan Kepmendikbudristek RI No 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran (Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, 2022) menjelaskan bahwa satuan pendidikan menyediakan pilihan minimal satu jenis seni dari empat jenis seni yaitu Seni Musik, Seni Rupa, Seni Teater, dan Seni Tari yang dimulai dari kelas I – VI.

B. IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH DASAR

1) SD Merdeka menentukan Penerapan Kurikulum

SD Merdeka memiliki fleksibilitas untuk menentukan kurikulum yang digunakan dalam penerapan merdeka belajar. Terdapat 3 pilihan yaitu Kurikulum 2013 secara penuh, Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan), dan Kurikulum Merdeka. Fleksibilitas pemilihan kurikulum ini memiliki 2 tujuan utama yaitu, pertama untuk mengatasi krisis pembelajaran yang telah berlangsung dari tahun ke tahun (Siaran Pers Kemendikbudristek, 2022). Krisis ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar, sekitar 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum membaca dan matematika, dan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok social-ekonomi dalam hal kualitas belajar.

Kedua, untuk mengatasi hilangnya pembelajaran (learning loss) akibat pandemic COVID-19 yang memperparah krisis pembelajaran. Sebelum pandemic, kemajuan belajar selama satu tahun (untuk kelas 1 SD) adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi, setelah pandemic, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan (learning loss) yang setara dengan 6 bulan belajar untuk literasi dan 5 bulan belajar untuk numerasi (Kemendikbudristek, 2022). Data ini diperoleh dari sampel 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten/kota di 4 provinsi pada bulan Januari 2020 dan April 2021.

Salah satu acuan untuk memutuskan penggunaan kurikulum yang tepat di SD adalah dengan melihat hasil belajar siswa selama 12 bulan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, learning loss yang dihasilkan setara dengan 5 bulan belajar. Pada sekolah yang menggunakan Kurikulum Darurat learning loss yang dihasilkan setara dengan 1 bulan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara Kurikulum 2013 dan Kurikulum Darurat.

Acuan berikutnya untuk memutuskan penggunaan kurikulum yang tepat di SD adalah dengan melihat arah perubahan kurikulum ke depan (Kemendikbudristek, 2022) yaitu dengan 1) Struktur kurikulum yang lebih fleksibel, yaitu jumlah jam pelajaran yang harus ditargetkan terpenuhi dalam satu tahun; 2) Fokus pada materi yang esensial. Implikasinya capaian pembelajaran diatur per fase, bukan per tahun; 3) Memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai

kebutuhan dan karakteristik siswa; 4) Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagai praktik baik.

2) Penerapan IPAS

Perubahan pelajaran IPA dan IPS menjadi IPAS bertujuan untuk menguatkan kompetensi dasar siswa dan pemahaman yang holistik. Pembelajaran IPAS merupakan sarana agar siswa memiliki capaian pengetahuan tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta beserta interaksinya. Fokus utama yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPAS adalah kompetensi siswa dalam memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Guna mencapai fokus utama tersebut, terdapat 2 elemen yang harus dipenuhi dalam penerapan Pembelajaran IPAS yaitu pemahaman IPAS dan keterampilan proses (Kemendikbudristek, 2022).

Selanjutnya Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mengukur Capaian Pembelajaran.

Alur tujuan pembelajaran (ATP) yang memiliki fungsi yang sama dengan silabus, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Selain itu, ATP sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran di akhir fase tersebut. Langkah Menyusun Alur Tujuan pembelajaran (Kemendikbudristek, 2022) yaitu 1) melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap; 2) identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi-kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase; 3) melakukan analisis setiap elemen dan atau sub elemen Profil Pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan Capaian Pembelajaran pada Fase tersebut; 4) Berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran; 5) Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari; 6) Tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran (setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama); 7) Berdasarkan perumusan TP tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan.

3) USBN dihapus diganti Asesmen Sekolah

Asesmen sekolah merupakan mekanisme baru yang bertujuan untuk mengukur kualitas layanan sekolah terhadap pembelajaran yang dilakukan. Siswa bukan menjadi subjek utama yang menjadi sasaran pengukuran melainkan kondisi belajar di yang diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan. Bentuk asesmen sekolah sebagai berikut (Kemendikbudristek, 2019).

A) Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)

Mencakup aspek literasi dan numerasi, bukan berdasarkan mata pelajaran. Dilakukan pada siswa yang berada di kelas IV. Hasilnya akan memberi

gambaran mutu pembelajaran yang telah dilakukan sekolah sehingga pada jenjang berikutnya dapat memperbaiki mutu pembelajaran.

AKM dilaksanakan dalam bentuk tes tulis berbasis komputer. Sekolah dapat mempersiapkan siswa dengan menghadirkan pembelajaran yang tepat dalam mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi siswa.

B) Survey Karakter

Bertujuan untuk mengetahui karakter siswa yang dibangun oleh sekolah. Hasil survey akan diberikan kepada sekolah dalam bentuk rekomendasi perbaikan iklim pembelajaran yang tepat sesuai karakter profil pelajar Pancasila yang seharusnya dibangun di sekolah.

C) Survey Lingkungan Belajar

Bertujuan untuk mengetahui iklim pembelajaran baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Hasil survey akan memberi gambaran mekanisme perlakuan masyarakat terhadap pembelajaran ataupun terhadap siswa secara langsung.

4) Perubahan Porsi Zonasi dalam PPDB

Kebijakan PPDB dilaksanakan sekolah secara fleksibel dengan memperhatikan ketentuan yaitu, 1) Jalur zonasi mengalokasikan minimal 50% dari kuota kursi siswa baru; 2) Jalur afirmasi mengalokasikan minimal 15% dari kuota kursi siswa baru; 3) Jalur perpindahan mengalokasikan maksimal 5% dari kuota kursi siswa baru; 4) Jalur prestasi mengalokasikan 0-30% dari kuota kursi siswa baru serta menyesuaikan kondisi daerah (Kemdikbudristek, 2019).

Daerah memiliki kewenangan dalam menentukan proporsi akhir dan menetapkan wilayah zonasi. Hal yang perlu dipahami adalah sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.

5) Maksimal 50% Dana BOS dapat digunakan untuk Gaji Guru Honorer

Merdeka Belajar episode 3 menghadirkan kebijakan baru terkait dengan pengelolaan dana BOS. Terdapat 4 poin kebijakan yaitu penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan BOS meningkat, dan pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel (Kemendikbudristek, 2020). Kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud No.8 Tahun 2020.

6) Partisipasi Sekolah dalam Guru Penggerak

Program Guru Penggerak fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya. Program Guru Penggerak menjadikan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai mitra Guru Penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah (Kemendikbudristek, 2021). Selain itu, program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan Indonesia masa depan. Program Guru Penggerak menghasilkan asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitis, motivasi, dan kompetensi lain sehingga data guru dapat digunakan sebagai pengembangan pelatihan dan pengukuran keberhasilan guru yang lebih objektif.

Program Guru Penggerak mengembangkan Komunitas Praktik sebagai ruang belajar bersama dan berkolaborasi antar guru. Sehingga guru bisa saling dukung saat menghadapi kesulitan dalam penerapan konsep yang baru dipelajari. Guru Penggerak memberdayakan ekosistem sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid dengan menjadikan data dan hasil refleksi sebagai basis menentukan kebijakan/program. Program pelatihan-pelatihan guru harus mengedepankan coaching dan on-the-job-training untuk memastikan teori-teori pembelajaran yang didapatkan di ruang pelatihan bisa ditransformasikan ke dalam pembelajaran di dalam kelas dan berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar.

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Perjalanan Guru Penggerak dimulai dengan tahap seleksi dan mengikuti rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan.

Sekolah dapat memberikan kesempatan guru-gurunya untuk mengikuti seleksi guru penggerak yang saat ini sudah membuka untuk Angkatan 7. Informasi lengkap tentang guru penggerak tersedia secara daring pada platform merdeka dengan tautan <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>

7) Penerapan Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan adalah platform yang menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Kebijakan evaluasi sistem pendidikan yang baru lebih menekankan pada orientasi terhadap mutu pendidikan dan sistem yang terintegrasi. Mengukur indikator yang disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Indikator tersebut diturunkan dari 8 Standar Nasional Pendidikan.

Rapor Pendidikan terdiri dari dua macam, yaitu: Rapor satuan pendidikan, yang menampilkan indikator juga hasil mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan dan Rapor pendidikan daerah, yang menampilkan indikator juga hasil mutu pendidikan dari daerah dan satuan pendidikan di daerah tersebut. Rapor Pendidikan dapat diakses melalui laman situs <https://raporpendidikan.kemdikbud.go.id/>

Rapor Pendidikan tidak bersifat wajib, namun sangat disarankan untuk menggunakan Rapor Pendidikan sebagai bahan acuan dasar dalam pelaksanaan perencanaan berbasis data. Data yang ada dalam Rapor Pendidikan sudah sangat lengkap dan dapat merepresentasikan kondisi satuan pendidikan pada saat ini, sehingga pada dasarnya tidak diperlukan lagi untuk melakukan pengumpulan data atau penggunaan data di luar Rapor Pendidikan oleh satuan pendidikan.

Platform Rapor Pendidikan menyediakan data laporan hasil evaluasi sistem pendidikan (Profil Pendidikan) sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya. Profil Pendidikan digunakan untuk berbagai bentuk Evaluasi Sistem Pendidikan. Rapor pendidikan saat ini dapat diakses oleh kepala dan operator satuan pendidikan serta pejabat dinas yang ditunjuk, sementara tenaga pendidik dapat mengakses rapor pendidikan pada rilis berikutnya.

Rapor untuk siswa dalam Kurikulum Merdeka mengalami pembaruan dengan 3 alternatif penyusunan, yaitu 1) Alternatif 1 mengolah seluruh data formatif dan sumatif yang kemudian dijadikan rapor siswa. Keunggulan dari cara ini adalah asesmen berdasarkan data yang utuh sehingga guru memiliki pijakan yang lebih banyak guna menentukan nilai akhir dan data berupa angka lebih mudah untuk diolah. Sementara kelemahan dari metode ini adalah usaha yang perlu dilakukan oleh guru lebih banyak, waktu mengumpulkan dan mengolah data lebih lama, serta penilaian yang berupa angka belum menjelaskan keseluruhan kompetensi secara holistik; 2) Alternatif 2 mengolah beberapa hasil formatif yang berupa angka dan seluruh sumatif menjadi nilai rapor. Keunggulan cara ini yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan mengolah nilai lebih singkat serta informasi kemajuan belajar siswa lebih bervariasi sebab memadukan data kuantitatif dan kualitatif. Sementara kelemahan metode ini adalah adanya potensi kesalahan dalam menentukan tujuan pembelajaran yang akan dinilai secara kuantitatif, usaha guru menjadi lebih banyak sebab harus mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, serta kemungkinan kesulitan dalam menentukan deskripsi jika hasil asesmen kurang lengkap; 3) Alternatif 3 mengolah seluruh data sumatif untuk nilai rapor. Keunggulan metode ini yaitu waktu untuk mengolah nilai lebih singkat serta pengumpulan dan pengolahan lebih mudah. Sementara kelemahan metode ini adalah berpotensi mengabaikan asesmen formatif serta kesulitan dalam menentukan deskripsi jika data formatif tidak lengkap.

SIMPULAN

Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang fleksibel dan berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Kurikulum Merdeka disebut sebagai kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Karakteristik utama Kurikulum Merdeka yaitu 1) Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila, 2) Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, 3) Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Satuan pendidikan dapat menambahkan muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik daerahnya.

Struktur Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar terdiri dari 2 kegiatan utama, yaitu 1) pembelajaran intrakurikuler dan 2) proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran intrakurikuler mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan jenjang masing-masing. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Penyusunan CP per fase merupakan upaya untuk memberikan kesempatan 1) bagi peserta didik belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar mereka; dan 2) bagi guru dan satuan pendidikan untuk mendapatkan fleksibilitas dan keselarasan pada kondisi dan karakteristik peserta didik dalam belajar. Capaian pembelajaran di tingkat SD/MI terdiri dari 3 fase yaitu

Fase A di kelas 1 dan 2 untuk usia 6-8 tahun, Fase B di kelas 3 dan 4 untuk usia 8-10 tahun, dan Fase C kelas 5 dan 6 untuk usia 10-12 tahun. Selanjutnya alur untuk mencapai akhir fase disesuaikan dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik tidak selalu berada dalam fase yang sama untuk setiap mata pelajaran.

Modul ajar adalah dokumen yang memiliki isi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang berupa nilai kuantitatif tidak lagi digunakan dalam Kurikulum Merdeka. Rapor intrakurikuler merupakan rapor atau laporan hasil belajar yang digunakan dalam kurikulum merdeka yang tersusun dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif dengan nilai akhir yang mempertimbangkan hasil asesmen formatif dan sumatif.

Platform merdeka mengajar merupakan platform edukasi untuk mendukung guru dalam meningkatkan kompetensi dan menyajikan pembelajaran berdasarkan Kurikulum Merdeka. Platform merdeka mengajar dapat diakses melalui aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh di Google Playstore maupun melalui laman situs guru.kemendikbud.go.id. Integrasi mata pelajaran IPA dan IPS di tingkat SD/MI dengan mengubah penamaan menjadi Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS). IPAS merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di alam semesta serta interaksinya, dan mengkaji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya.

Saran bagi kampus pendidikan, dengan adanya kebijakan kurikulum merdeka maka kampus perlu melengkapi materi mata kuliah dengan kebutuhan kurikulum merdeka, kampus perlu memberikan hak belajar ke mahasiswa untuk belajar di luar prodi, kampus perlu menyesuaikan perubahan definisi SKS, dan kampus perlu melakukan tracer studi yang terjadwal untuk mengukur kualitas kinerja. Setiap SD bebas menentukan kurikulum yang akan diterapkan. Beberapa kekhasan apabila SD menerapkan kurikulum merdeka yaitu penerapan IPAS, integrasi pelajaran keterampilan di pelajaran seni, dan penerapan asesmen sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemdikbudristek. (2019). *Siaran pers merdeka belajar 1: Mendikbud Tetapkan Empat Pokok kebijakan Pendidikan "Merdeka Belajar."*
- Kemendikbud RI. (2022). *Merdeka Belajar Episode 15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.* [www.youtube.com. https://www.youtube.com/watch?v=T2-s6yY9yoI](https://www.youtube.com/watch?v=T2-s6yY9yoI)
- Kemendikbudristek. (2021a). *Buku Saku Platform Merdeka Mengajar.* Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <http://repository.kemdikbud.go.id/id/eprint/24918>
- Kemendikbudristek. (2021b). *Buku Saku Tanya Jawab Kurikulum Merdeka.* Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. <http://repository.kemdikbud.go.id/id/eprint/24917>

- Keputusan Mendikbudristek Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran, (2022).
- Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Nomor 008/H/Kr/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka, (2022).
- Nurholis, D., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Kurikulum 2013. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 98–114.
- OECD. (2019). *Programme for International Students Assessment (PISA)- Results from PISA 2018*. Organisation for Economic Co-Operation and Development. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf
- Rawati, S., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar di Sekolah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 82–97.
- Siaran Pers Kemendikbudristek. (2022). *Praktik Guru Gunakan Platform Merdeka Mengajar, Mudah dan Inspiratif*. Kemdikbud.Go.Id. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2022/02/praktik-guru-gunakan-platform-merdeka-mengajar-mudah-dan-inspiratif>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(July), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sufyadi, S., Lambas, Rosdiana, T., Rochim, F. A. N., Novrika, S., Iswoyo, S., Hartini, Y., Primadonna, M., & Mahardhika, R. L. (2021). *Panduan Pembelajaran dan Asesmen Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA)*. Pusat Asesmen dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Tarsini, & Ningsih, T. (2021). Integrasi Pembelajaran IPS dan IPA Kelas IV di Madrasah Ibtidaiyah Pembina Pengamalan Agama (MI P2A) Meri Kutasari Purbalingga. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(3), 382–388. <https://doi.org/10.36312/jime.v7i3.2274>